BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dalam bab pembahasan tersebut maka dapat disimpulkan, yaitu:

1. Pengaturan upaya politik kriminal terhadap tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia sangat dibutuhkan. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Dalam hal ini dibutuhkan integrasi yang baik antara upaya penal dan upaya non penal, akan tetapi Pasal 85 ayat (2) UUPPLH yang menyebutkan bahwa “Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku bagi tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ini”. Dimana, ketentuan tersebut secara substansial tidak sejalan dengan hakikat perlindungan lingkungan hidup. Proses penegakan hukum yang panjang dan mahal, memungkinkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup terus berlangsung, menjadi semakin parah, dan semakin kecil kemungkinan pemulihannya.
2. Formulasi upaya politik kriminal dalam penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia, dalam hal ini dilakukan dengan membuat ketentuan penanggulangan kejahatan yang terintegrasi, karena masing-masing tidak berdiri sendiri, artinya harus ada keseimbangan dalam penggunaan kedua sarana baik penal maupun non penal. Penyelesaian kasus tindak pidana terhadap lingkungan hidup dapat dilakukan dengan beberapa

formulasi, yaitu: 1) Formulasi dengan uang pengganti. 2) Formulasi dengan menerapkan Sanksi Pidana; dan 3) Formulasi Pidana Penutupan Korporasi (Perusahaan) atas Delik Lingkungan Hidup. Kebijakan formulasi hukum pidana di Indonesia untuk melindungi korban tindak pidana lingkungan hidup di masa depan adalah dengan memperbaiki sanksi pidana dan menambahkan sanksi ganti kerugian seperti restitusi dan kompensasi sebagai bagian dari pidana pokok. Hal ini penting untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban, terutama dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi. Penambahan sanksi restitusi dan kompensasi juga diatur dalam undang-undang lingkungan hidup, termasuk mekanisme dan besaran ganti rugi yang jelas. Konsep ini harus diatur dalam aturan pelaksanaan untuk menghindari ketidakpastian dan merugikan korban dalam pelaksanaan di lapangan.

B. Saran

1. Pemerintah perlu dilakukan rekonstruksi terhadap Undang-Undang Lingkungan Hidup terkait sanksi pidana yang diberikan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dengan penambahan sanksi pemberian ganti kerugian kepada korban, serta mengatur penyelesaian sengketa di luar pengadilan terhadap tindak pidana lingkungan hidup.
2. Pendayagunaan sanksi pidana juga dimaksudkan bertujuan untuk memberikan rasa takut kepada korporasi dan memberi sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, denda, perintah memulihkan lingkungan yang

tercemar, penutupan tempat usaha dilaksanakan dengan sesegera mungkin, artinya melaksanakan dengan cepat.